|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **EVALUASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI OLEH PEMERINTAH KOTA SURABAYA DI KELURAHAN BULAK BANTENG, KECAMATAN KENJERAN** |

 |

**Arimurti Kriswibowo, Adinda Prameiswary, Zildjianisa Rhisma W., Lylu Tirta Damayanti**

arimurti.adne@upnjatim.ac.id

Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur

|  |
| --- |
| **Abstrak**Kepadatan penduduk biasa terjadi di kota-kota besar salah satunya kota Surabaya. Keterbatasan lahan menyebabkan harga perumahan di kota Surabaya terus meningkat sehingga sebagian masyarakat tidak mampu untuk memilikinya. Pemkot Surabaya mengatasi ketimpangan ketersediaan tempat tinggal yang layak ialah melalu Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi proses penyediaan rumah layak huni di Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa indikator Kesamaan, Responsivitas, dan Ketepatan sasaran telah dipenuhi dengan baik melalui bantuan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, namun indikator Efektivitas, Efisiensi serta Kecukupan belum terpenuhi karena beberapa kendala seperti kurangnya transparansi dalam proses penyaluran dana dan pembangunan rumah menggunakan bahan bangunan berkualitas yang rendah. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait pengelolaan rumah layak huni pasca pembangunan.**Abstract**Population density is common in big cities, one of which is the city of Surabaya. Limited land causes housing prices in the city of Surabaya to continue to increase so that some people cannot afford to own it. The Surabaya City Government has overcome the imbalance in the availability of adequate housing through the Social Rehabilitation Program for Uninhabitable Houses. This writing aims to determine the evaluation of the process of providing livable housing in Bulak Banteng Village, Kenjeran District. The research method used is a qualitative research method with a descriptive approach. The results showed that the indicators of Similarity, Responsiveness and Accuracy on target had been met well through assistance in providing livable housing for the poor in Bulak Banteng Village, Kenjeran District, but the indicators of Effectiveness, Efficiency and Adequacy had not been fulfilled due to several obstacles such as lack of transparency in the process distribution of funds and the construction of houses using low quality building materials. Therefore it is necessary to carry out further research related to the management of livable houses after construction. |
| ***Kata kunci: Evaluasi, Permukiman,Rutilahu*** |

**1. Pendahuluan**

Permukiman Kumuh merupakan masalah yang hampir dihadapi semua kotakota besar di Indonesia bahkan oleh kota-kota besar yang ada di Negara berkembang lainnya. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahun sehingga dapat menyebabkan tingginya permintaan akan perumahan di perkotaan dan menimbulkan permukiman yang padat. Penyebab masalah lain yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan akan perumahan yang ada di perkotaan antara lain adalah karena minimnya lahan permukiman sehingga harga lahan semakin tinggi.

Kota Surabaya merupakan kota metropolitan kedua di Indonesia dengan kepadatan penduduk berdasarkan data dari Dispendukcapil sebanyak 3.095.026 jiwa pada tahun 2019. Sedangkan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Pada tahun 2018 penduduk miskin Kota Surabaya sebanyak 141.000 jiwa, dengan luas wilayah kota 326,81 hektar. Dengan adanya kepadatan penduduk tersebut bisa di pastikan akan terjadi peningkatan daerah kumuh di kota Surabaya. Hal ini dapat membuat masyarakat yang berada di daerah kumuh tersebut sulit untuk memperbaiki kondisi tempat tinggal mereka yang semakin lama semakin tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal yang sehat dan nyaman. Pendapatan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah juga dapat mengakibatkan ketidakmampuan masyarakat untuk membangun ataupun menyewa tempat tinggal yang layak, sehingga masyarakat lebih memilih bertempat tinggal di kawasan daerah yang kumuh karena harga lahan yang cukup murah. Masyarakat juga tidak peduli akan kondisi fisik lingkungan yang buruk, di mana kondisi tersebut dapat mempengaruhi kondisi kesehatan, sumber pencemaran, penyebaran penyakit serta perilaku menyimpang, yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Pemerintah memberikan solusi untuk mereka yang kurang mampu agar tinggal di RUSUNAWA (Rumah Susun Sederhana Sewa) dengan biaya yang relatif murah. Namun kenyataannya Rusunawa pemerintah kota Surabaya tidak semua memiliki keadaan yang baik. Salah satu Rusunawa yang kian memprihatikan dan memiliki banyak kerusakan yakni Rusunawa Sombo dan Penjaringan. Banyaknya kerusakan tersebut berakibat pada keadaan yang memaksa warga untuk memilih memperbaiki sendiri rumah tinggal mereka. Warga penghuni Rusunawa memilih untuk kembali ke rumah tinggal mereka, meskipun memiliki keadaan yang jauh lebih memprihatinkan. Mereka beranggapan bahwa lebih baik jika uang yang mereka gunakan untuk membayar iuran, digunakan untuk kebutuhan lainnya dan memilih kembali ke rumah tinggal mereka. Namun disisi lain hal tersebut menyebabkan semakin banyaknya jumlah rumah tinggal tidak layak huni yang menuntut pemerintah kota Surabaya untuk membuat program lain demi menurunkan angka kemiskinan. Salah satu pogram yang telah di lakukan pemerintah kota Surabaya yakni Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Salah satu alasan dibentuknya Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, karena jumlah dan presentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat pertama. Perluh adanya sebuah program untuk meminimalisir jumlah penduduk miskin di Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian (Fauziah, n.d.), menyatakan bahwa kebijakan pembangunan perumahan yang diselenggarakan sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan adalah Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

Dari pihak pelaksana, Pemkot Surabaya seperti Disperkim Kota Surabaya sebagai koordinator dalam pelaksanaan program telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan cukup baik. Mereka mengetahui dengan jelas sebaran kawasan kumuh dan memiliki data kawasan kumuh dan selalu berusaha melakukan penelitian terhadap kawasan kumuh (Andini, 2013). Hal ini tentunya sangat berguna untuk menentukan kelompok sasaran yang akan menerima manfaat program melalui data dan penelitian yang mereka pelajari. Selain itu, (Andini, 2013) menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya juga selalu mendukung perbaikan kawasan kumuh karena masyarakat sangat membutuhkan meringankan bebannya baik dalam konteks ekonomi maupun sosial. Selain itu, pemerintah juga selalu berusaha memberikan bantuan berupa barang dan jasa. Pemerintah Kota Surabaya menggunakan model intervensi pembangunan kembali on-site, yaitu rekonstruksi permukiman yang sangat miskin dan tidak aman melalui pembongkaran bertahap dan pembangunan perumahan alternatif *on-site* (Nassar & Elsayed, 2018) Artinya, pemerintah menghormati hak hukum warga atas perumahan alternatif dan ketergantungan mata pencaharian mereka di lokasi yang sama.

Senada dengan (Firdaus, 2016) Pemerintah telah melakukan upaya pemenuhan hak atas perumahan yang layak bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, seperti perumahan yang layak sesuai dengan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. Pemerintah menghormati hak hukum warga atas perumahan alternatif dan ketergantungan pada mata pencaharian mereka di lokasi yang sama. Selanjutnya, masyarakat sebagai kelompok sasaran mendukung pelaksanaan program yang secara substansial memberikan banyak manfaat positif. masyarakat merasa terbantu karena rumahnya menjadi layak huni, sehat dan aman. Hal ini didukung oleh pernyataan dari (Tursilarini, TY, & Udiati, T., 2020) bahwa program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dapat memberikan manfaat baik dari aspek fisik. Rumah menjadi layak huni karena kondisi atap, dinding, dan lantainya lebih baik; aspek psikologis adalah pemilik rumah merasa lebih nyaman, aman, dan tenang; serta aspek sosial bahwa kebersamaan antara anggota keluarga dan masyarakat sekitar semakin baik.

Menurut berita yang dirilis oleh (MENPANRB, 2020), Alokasi anggaran perbaikan rumah tidak layak huni berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dimana untuk setiap unit rumah mendapat alokasi sebesar 30 juta rupiah. Anggaran ini juga mendukung pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni. Jadi, mereka bisa lebih komprehensif dan bahkan mengarah pada peluang bisnis baru. Masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar dan keluarga penerima ikut serta dalam pelaksanaan program tersebut, baik memberikan bantuan berupa bahan bangunan maupun tenaga kerja (Kusuma Pratama & Fitrotun, 2021). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program sangat penting untuk mencapai tata pemerintahan yang baik, McAuslan menyatakan (Otsuki, 2016) “Tata kelola kota yang baik jika proses, prosedur, dan kegiatan didasarkan pada partisipasi dan keterlibatan semua warga dan organisasinya untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas". baik memberikan bantuan berupa bahan bangunan maupun tenaga kerja (Kusuma Pratama & Fitrotun, 2021)

Wilayah sasaran program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni mengacu pada Keputusan Walikota Nomor 188.45/143/436.1.2/2015 tentang Kawasan Prioritas Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman di Kota Surabaya dimana 26 kelurahan dengan luas wilayah 145,89 hektar telah ditetapkan sebagai kawasan prioritas untuk peningkatan kualitas perumahan dan permukiman. Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran merupakan salah satu kelurahan penerima manfaat Rutilahu kategori Prioritas I di Kota Surabaya. Hal ini membuktikan bahwa Kecamatan Kenjeran sebagai salah satu permukiman kumuh yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Kota Surabaya. Kecamatan Kenjeran berada di perbatasan Kota Surabaya dengan Pulau Madura dengan memiliki jumlah penduduk 179,198 jiwa.

Tujuan penulisan ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi proses penyediaan rumah layak huni di Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran. Hal ini penting untuk mengetahui kesesuaian sasaran program dan mekanisme bantuan bagi masyarakat miskin. . Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menggunakan indikator teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yang terdiri dari 6 kriteria, yakni: Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Kesamaan, Responsivitas, dan Ketepatan.

Dalam melakukan penelitian diperlukan suatu pedoman yang telah dilakukan sebelumnya untuk dijadikan sebagai acuan dan referensi bagi penulis terkait teori dan tolak ukur dalam melakukan penelitian, salah satu pedoman ini dalam bentuk penelitian terdahulu. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diperlukan beberapa penelitian terdahulu yang bertujuan untuk mengumpulkan referensi yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh (Eriza, n.d.) tentang Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Dalam Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.

Penelitian evaluasi program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh dalam kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni ini dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan program tersebut, dengan menggunakan indikator dan tolak ukur berdasarkan kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Adanya evaluasi program RSDK dalam kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni ini dapat memberikan informasi/ rekomendasi tentang perkembangan program Evaluasi proses penyediaan rumah layak huni di Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran pentoing dilakukan untuk mengetahui kesesuaian sasaran program dan mekanisme bantuan bagi masyarakat miskin. Selain itu juga dengan adanya evaluasi dapat mengetahui berbagai permasalahan yang mungkin terjadi setelah pelaksanaan program.

**2. Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan untuk mendapatakan gambaran secara komprehensif dan memahami tentang pembeedayaan masyarakat oleh Pemerintah Kota Surabaya pada Rumah Tidak Layak Buni di Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Pendekatan deskriptif yang kami gunakan merupakan salah satu metodologi penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah dengan langkah mendeskripsikan, menjelaskan dan menganalisis situasi dan kondisi yang sedang terjadi dalam suatu obyek permasalahan dari sudut pandang peneliti yang didasarkan pada telaah pustaka yang menujang atau studi literature. Peneliti ingin menggambarkan serta mendeskripsikan secara detail tentang fenomena atau permasalahan diangkat dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan selama periode bulan Oktober 2022 di :

1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Surabaya
2. Pemerintah Kelurahan Bulak Banteng , Kecamatan Kenjeran , Kota Surabaya
3. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran

**3. Hasil dan Pembahasan**

Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surabaya bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan menaikkan kualitas rumah fakir miskin melalui perbaikan kondisi rumah menjadi rumah layak huni, sehat serta aman. Disperkim kota Surabaya menjalankan program ini dengan dibantu masyarakat dengan cara musyawarah dengan melibatkan lembaga masyarakat disetiap kelurahan yang ada, lembaga tersebut yaitu LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) dan UPKM (Unit Pemberdayaan Keluarga Miskin) dan juga melibatkan RT/RW setempat untuk menentukan masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan ini. Program ini hadir untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat ekonomi lemah di kota Surabaya, khususnya para masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Wilayah sasaran program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni mengacu pada Keputusan Walikota Nomor 188.45/143/436.1.2/2015 tentang Kawasan Prioritas Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman di Kota Surabaya dimana 26 kelurahan dengan luas wilayah 145,89 hektar telah ditetapkan sebagai kawasan prioritas untuk peningkatan kualitas perumahan dan permukiman. Berikut ini adalah daftar area prioritas tersebut:

**Tabel 3. 1 Daftar Area Prioritas Untuk Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Dan Pemukiman Di Kota Surabaya**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kecamatan** | **Kelurahan** | **Prioritas** |
| Wonokromo | Sawunggaling |  |
| Bulak | Kenjeran |  |
| Bulak | Kedung Cowek |  |
| Bulak | Sukolilo Baru |  |
| Kenjeran | Bulak Banteng | Prioritas I |
| Rungkut | Rungkut Kidul |  |
| Rungkut | Kalirungkut |  |
| Semampir | Wonokusumo |  |
| Semampir | Sidotopo |  |
| Gubeng | Airlangga |  |
| Mulyorejo | Kalisari |  |
| Pakal | Benowo |  |
| Simokerto | Tambakrejo | Prioritas II |
| Sukomanunggal | Putat Gede |  |
| TenggilisMejoyo | Kutisari |  |
| Krembangan | Morokrembangan |  |
| Asemrowo | Asemrowo |  |
| Bubutan | Bubutan |  |
| Bubutan | Gundih |  |
| Gunung Anyar | Gunung Anyar Tambak |  |
| Semampir | Sidotopo | Proritas III |
| Tandes | Tandes |  |
| Wonokromo | Darmo |  |
| Krembangan | Dupak |  |
| Tandes | Karangpoh |  |

*Sumber: Bappeko (2018)*

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran merupakan salah satu kelurahan penerima manfaat Rutilahu kategori Prioritas I di Kota Surabaya. Hal ini membuktikan bahwa Kecamatan Kenjeran sebagai salah satu permukiman kumuh yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Kota Surabaya. Hal ini yang menjadi alasan mengapa penulis melakukan penelitian dilokasi tersebut.

Masalah permukiman kumuh telah banyak dibahas dan dikaji oleh peneliti sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Suradi, 2016), beliau mengkaji permukiman kumuh ditinjau dari model identifikasi masalah sosial menggunakan bentuk lingkaran dengan lima aspek yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Model identifikasi ini menghasilkan informasi yang faktual dan komprehensif mengenai permasalahan sosial di kawasan kumuh perkotaan. Dengan demikian dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan kebijakan dan program sosial. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Chowdhury & Amin, n.d.) melengkapi penelitian sebelumnya bahwa untuk mengatasi permasalahan permukiman kumuh diperlukan suatu penilaian lingkungan (*environment assessment/EA*) dalam merancang dan menempatkan infrastruktur.

Dalam melakukan penelitian diperlukan suatu pedoman yang telah dilakukan sebelumnya untuk dijadikan sebagai acuan dan referensi bagi penulis terkait teori dan tolak ukur dalam melakukan penelitian, salah satu pedoman ini dalam bentuk penelitian terdahulu. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis memerlukan beberapa penelitian terdahulu yang bertujuan sebagai referensi yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Eriza, n.d.) tentang Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Dalam Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. Penelitian evaluasi program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh dalam kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni ini dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan program tersebut, dengan menggunakan indikator dan tolak ukur berdasarkan kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Adanya evaluasi program RSDK dalam kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni ini dapat memberikan informasi/ rekomendasi tentang perkembangan program.

Hasil dari evaluasi ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program yang sudah cukup sesuai dengan kriteria pelaksanaan program. Tujuan dan sasaran target program tepat sasaran karena syarat target sasaran yang disebutkan di Perwali adalah masyarakat miskin yang mempunyai rumah tidak layak huni. Efisiensi pelaksanaan program , belum sepenuhnya efisien karena masih ada kekurangan terjadi dalam jumlah pekerja perbaikan rumah yang kurang. Serta dana yang diberikan oleh warga kurang mencukupi untuk perbaikan keseluruhan bangunan rumah warga. Seharusnya adanya penambahan pekerja untuk memperbaiki rumah warga. Kecukupan pelaksanaan program yang dinilai dari keberhasilan aspek fisik meningkat tinggi. Perataan dilihat dari sosialisai dan pemerataan dana bantuan sudah dilakukan secara adil. Tingkat responsivitas masyarakat program perbaikan rumah tidak layak huni cukup tinggi karena dari awal pelaksanaan program sampai selesainya program peran masyarakat sangat berpengaruh. Ketepatan pelaksanaan program ini juga sesuai dengan yang diinginkan. Pemahaman masyarakat tentang program perbaikan rumah ini cukup baik.

Berdasarkan pedoman tersebut penulis melakukan penelitian dengan lokus yang berbeda yaitu di Kelurahan Bulak Banteng,Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. Dengan tujuan untuk mengevaluasi proses penyediaan rumah layak huni di Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran. Hal ini penting untuk mengetahui kesesuaian sasaran program dan mekanisme bantuan bagi masyarakat miskin. Dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki kesamaan indikator teori, yaitu indikator teori evaluasi kebijakan menurut William N.Dunn yang terdiri dari 6 kriteria, yakni: Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Kesamaan, Responsivitas, dan Ketepatan.Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan beberapa perbedaan terkait hasil penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya serta permasalahan yang ditemukan juga berbeda.

* 1. ***Indikator Hasil Efektivitas***

Berdasarkan hasil temuan, dalam pelaksanaan pembangunan program RS- RUTILAHU tersebut, sebelumnya ada Kunjungan dari Disperkim Surabaya dan selanjutnya diadakan Musrembang di Kelurahan bersama para RT/RW kemudian dibentuk Panitia khusus Pelaksanaan Program RS-RUTILAHU. Pada tahun 2022 program RS-RUTILAHU melalui Disperkim Surabaya terdata 12 rumah yang mendapat bantuan perbaikan rumah di Wilayah Kelurahan Bulak Banteng.

Adapun pencapaian dari pelaksanaan program RS-RUTILAHU yang dilakukan di Kelurahan Bulak Banteng tersebut sesuai dengan isi dari pedoman Perwali Kota Surabaya Nomor 09 Tahun 2022 tentang Rehabilitasi Sosial Rutilahu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa indikator efektivitas dari pelaksanaan program tersebut sudah berjalan efektif

* 1. ***Indikator Hasil Efisiensi***

Hasil temuan di lapangan bahwa dalam proses pembangunan yang dilaksanakan, seharusnya jangka waktu yang diberikan pada tiap rumah itu selesai dalam 19 hari. Namun kenyataannya waktu pelaksanaannya tergantung dari biaya yang dikeluarkan oleh Disperkim Kota Surabaya dan terhitung per tahap.

Dari hasil temuan di lapangan dapat di katakan bahwa indikator efisien dari pelaksanaan program tersebut masih kurang maksimal dikarenakan target jangka waktu penyelesaian pembangunan di setiap rumah tidak sesuai dengan proses pembangunannya yang berdasarkan pencairan dana per tahap, sehingga proses pembangunan di setiap rumah ada yang kurang dari 19 hari dan juga ada yang melebihi jangka waktu yang telah ditargetkan oleh tim pelaksana pembangunan.

* 1. ***Indikator Hasil Kecukupan***

Berdasarkan hasil penelitian, muncul beberapa keluhan yang dipaparkan terkait hasil program RS-Rutilahu yakni bahan-bahan material yang digunakan untuk pembangunan rumah tidak bertahan lama karena terdapat bahan bangunan yang telah kembali rusak seperti asbes yang masih bocor karena adanya kesalahan saat pemasangan asbes untuk atap rumah, dan tembok rumah yang bahannya telah kembali rusak.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa indikator kecukupan dari pelaksanaan program tersebut masih rendah karena berdasarkan keluhan yang diberikan oleh warga penerima program yang mengatakan bahwa hasil dari pelaksanaan program tersebut bermanfaat akan tetapi, proses penyelesaiannya masih kurang memuaskan karena bahan-bahan material pembangunan yang telah kembali mengalami kerusakan

* 1. ***Indikator Hasil Perataan***

Hasil penelitian di lapangan bahwa secara pelaksanaan program RS-RUTILAHU, dana Pembangunan yang di berikan oleh Pemerintah dibagi sama rata yaitu per rumah diberikan dana Rp.30 Juta untuk digandakan membeli bahan-bahan material pembangunan yang berupa Semen, Pasir, Keramik, Asbes dan cat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa indikator Perataan dari pelaksanaan program RS-RUTILAHU tersebut sudah cukup karena biaya yang diberikan oleh Pemerintah yang selanjutnya digandakan sebagai bantuan bahan bangunan berupa material kepada setiap rumah diberikan sama rata yaitu dengan biaya tiap rumah mendapatkan Rp.30 juta.

* 1. ***Indikator Hasil Responsivitas***

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, responsivitas dari masyarakat Kelurahan sangat membantu dalam proses pembangunan perbaikan rumah karena sebelum melaksanakan proses perbaikan rumah, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi maupun pendataan oleh ketua RT/RW dan pihak UPKM di setiap wilayah kelurahan mengenai bantuan yang akan diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Disperkim Kota Surabaya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indikator responsivitas dari masyarakat terhadap pelaksanaan program tersebut sangat baik karena adanya peran dari masyarakat setempat yang membantu pada saat proses pelaksanaan perbaikan rumah bagi warga penerima program.

* 1. ***Indikator Hasil Ketepatan***

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, responsivitas dari masyarakat Kelurahan sangat membantu dalam proses pembangunan perbaikan rumah karena sebelum melaksanakan proses perbaikan rumah, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi maupun pendataan oleh ketua RT/RW dan pihak UPKM di setiap wilayah kelurahan mengenai bantuan yang akan diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Disperkim Kota Surabaya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indikator responsivitas dari masyarakat terhadap pelaksanaan program tersebut sangat baik karena adanya peran dari masyarakat setempat yang membantu pada saat proses pelaksanaan perbaikan rumah bagi warga penerima program.

* 1. ***Dampak Program RUTILAHU dan Peran antar Aktor Kebijakan***

Dampak dari Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Bulak Banteng yakni adanya perbaikan rumah tidak layak huni. Dibuktikan dengan perbaikan rumah sesuai kerusakan yang sudah di survey oleh Disperkim Kota Surabaya sehingga kehidupan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Dampak fisik yang terjadi dengan adanya program pembangunan perbaikan rumah tidak layak huni tersebut dapat membantu perkembangan kondisi lingkungan tempat tinggal masyarakat yang berada di daerah permukiman kumuh. Dampak sosial yang terjadi yaitu dengan adanya kebijakan dari Pemerintah Kota Surabaya terkait program RUTILAHU tersebut memunculkan nilai yang bermanfaat dan berguna bagi kebutuhan hidup masyarakat.

**4. Penutup**

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) adalah program kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk mewujudkan rumah yang layak huni. Pembiayaan Implementasi program RS-RUTILAHU di Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kota Surabaya.

[Dampak perubahan fisik yang terjadi dengan adanya program pembangunan perbaikan rumah tidak layak huni tersebut dapat membantu perkembangan kondisi lingkungan tempat tinggal masyarakat yang berada di daerah permukiman kumuh.](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit) Sedangkan [Dampak sosial yang terjadi yaitu dengan adanya kebijakan dari Pemerintah Kota Surabaya terkait program RSDK tersebut memunculkan nilai yang bermanfaat dan berguna bagi kebutuhan hidup masyarakat](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit). Dampak dari Program RS-Rutilahu yang ada di Kelurahan Bulak Banteng dilihat berdasarkan hasil di lapangan secara keseluruhan sangat membantu masyarakat, karena sasaran atau target dari adanya pelaksanaan program tersebut sesuai dengan tujuan dan kriteria yang sebenarnya.

Berikut beberapa saran yang dapat diberikan oleh Peneliti terhadap Hasil Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni tersebut :

1. Perlu adanya penambahan jumlah perbaikan rumah yang dilaksanakan setiap tahunnya minimal 10 rumah untuk mengurangi padatnya permukiman kumuh di Wilayah Kelurahan yang tergolong luas.
2. Penerima program diharapkan untuk tidak segan memberi kritik dan saran terhadap hasil pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya.
3. Masyarakat diharapkan untuk dapat meningkatkan lagi partisipasi serta kepeduliannya dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni melalui bantuan bahan bangunan maupun gotong royong dalam proses perbaikan agar dapat menciptakan kenyamanan bagi warga penerima program

**Daftar Pustaka**

Andini, I. (2013). Sikap dan Peran Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Perbaikan Daerah Kumuh di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kota Surabaya. 1.

Chowdhury, F. J., & Amin, A. N. (n.d.). Environmental assessment in slum improvement programs: Some evidence from a study on infrastructure projects in two Dhaka slums. Environmental Impact Assessment Review, 26(6), 530–552.

Eriza, A. H. (n.d.). EVALUASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DAERAH KUMUH (RSDK) DALAM KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KELURAHAN WONOREJO KECAMATAN TEGALSARI KOTA SURABAYA.

Fauziah, F. (n.d.). INTEGRASI GENDER DALAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI PROGRAM BSPS KECAMATAN SEMARANG UTARA.

Firdaus, F. (2016). Pemenuhan Hak Atas Perumahan yang Layak Bagi Masyarakat Miskin Kota dalam Perspektif HAM (Pemenuhan Hak Perumahan yang Layak Bagi Kaum Miskin Perkotaan Perspektif Hak Asasi Manusia). Jurnal HAM, 7(2), 85–97.

Kusuma Pratama, F. A., & Fitrotun, N. (2021). Strategi Peningkatan Kualitas Hidup melalui Program Tahu Panas (Tak Takut Kehujanan, Tak Takut Kepanasan) oleh Dinas Sosial Kota Surabaya. Publika, 9(1), 295–306.

MENPANRB. (2020). Warga Surabaya Nikmati Rumah Layak Huni Berkat “Tahu Panas.” Retrieved from www.menpan.go.id/site/berita-terkini/warga-surabayanikmatirumah-layak-huni-berkat-tahu-panas

Nassar, D. M., & Elsayed, H. G. (2018). From Informal Settlements to sustainable communities. Alexandria Engineering Journal, 57(4), 2367–2376. doi: 10.1016/j.aej.2017.09.004

Otsuki. (2016). Infrastructure in informal settlements: Co-production of public services for inclusive governance. Local Environment, 21(12), 1557–1572.

Suradi. (2016). Model Identifikasi Permasalahan Sosial di Kawasan Kumuh Perkotaan. Sosio Informa, 1(2), 106–120.

Tursilarini, TY, & Udiati, T. (2020). Dampak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Bangka. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, 44(1), 1–21.